

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfred Labi. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013-2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 5(1), 1355–1370. <https://doi.org/10.36448/jak.v1i1.1393>
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1723>
- Amalia, F. (2017). Flypaper Effect of Regional Expenditure and It's Impact to Regional Inequality in Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(1), 125–138. <https://doi.org/10.15408/sjie.v6i1.3293>
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080–1110. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Assidi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(5), 1–11.
- bps.go.id. (2021). Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c). Diambil dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c.html>
- Dabamona, T. D. N. (2021). Refocusing Strategi Penganggaran Penanganan COVID-19 (Studi Kasus pada Bepelitbang Kabupaten Kepulauan Aru). *Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar*, 19, 1–49.
- Dewi, S., Sokarina, A., & Mariadi, Y. (2022). Kinerja Sektor Publik pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Teori Isomorfisma Institusional. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 1(2), 256–266. Diambil dari <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jam/article/view/135/94>
- djpk.kemenkeu.go.id. (2022). Data Keuangan Daerah Mulai 2006. Diambil dari [https://djpk.kemenkeu.go.id/?page\\_id=23282](https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=23282)
- Fadhila, N., & Tanjung, J. S. (2022). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value for Money. *BURSA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 126–134.
- Harahap, L. R., Anggraini, R., Ellys, E., & Effendy, R. Y. (2021). Analisis Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Perusahaan Pt Eastparc Hotel, Tbk (Masa Awal Pandemi Covid-19). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 57–63. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i1.4050>
- Hoesada, J. (2021). *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, M. A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mawardi, D., Harianto, K., & Kusumawardani, M. R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Bappeda Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017-2021 Menggunakan Konsep Value for Money, *1*(4), 72–80.
- Mulyaningtyas. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Kota Mojokerto dengan Pendekatan Value for Money. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, *1*(1), 1–14.
- Nurafifah, I. P., Haliah, & Nirwana. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah daerah dengan Menggunakan Pendekatan Value for Money (Studi Kasus pada Kabupaten Nabire tahun 2019-2021). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi)*, *2*(2).
- Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Paat, Y. (2021). Dampak Pandemi terhadap Pendapatan DKI tidak Signifikan. Diambil dari <https://jakarta.bpk.go.id/dampak-pandemi-terhadap-pendapatan-dki-tidak-signifikan/>
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 2020. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2019. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. 2020. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.
- Perdana, T. A., Budiantoro, R. A., & Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra. (2020). Mengukur Kinerja APBD Kota Surabaya Analisis Value for Money. *Journal Inovasi*, *16*(2), 339–346. Diambil dari <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Permendagri 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. 2020. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri.
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., Tangkuman, S. J., Polii, I. R. A., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *8*(4), 781–788.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, *7*, 83–112.
- Pratama, D. M., & Suprayogi, N. (2020). Proses Penganggaran pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*,

7(6), 1036–1050. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1036-1050>

- Purnamawati, I. G. A. (2018). Dimensi Akuntabilitas dan Pengungkapan pada Tradisi Nampah Batu. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 312–330. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9019>
- Purnamawati, I. G. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.
- Purnamawati, I. G. A., & Lestari, N. K. E. K. (2022). Analisis Implementasi E-Budgeting Menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, And Product) Serta Dampaknya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik di SKPD Kabupaten Karangasem. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(03), 810–821. Diambil dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/36833>
- Purwadinata, S., Ismawati, I., & Elmiati, N. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Apbd Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 78–87.
- Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *Katalogis*, 5(3), 190–200.
- Rae, D. E. (2013). *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rosyidah, N., & Santoso, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen tahun 2015-2019. *Surakarta Accounting Review*, 2(2), 1–7.
- Rusdiansyah, Y. (2022). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 2020-2021*. Banjarbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
- Sari, G. Y. N., Nanda, S. T., Berty, I., & Zenita, R. (2022). Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 56–65.
- Siallagan, H. (2020). *Buku Teori Akuntansi Edisi Pertama*. LPPM UHN Press. Medan: LPPM UHN Press.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Alfabet.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alphabet.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2022. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. 2022. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. 2022. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. 2022. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2014. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 29 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. 2022. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.

